

BRI UMKM EXPO(RT) & MICROFINANCE OUTLOOK 2025

Sri Mulyani Apresiasi Upaya BRI dalam Pemberdayaan UMKM



Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan di BRI UMKM EXPO(RT) & BRI Microfinance Outlook 2025.

JAKARTA (KR) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendapatkan apresiasi atas usahanya dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) & BRI Microfinance Outlook 2025 yang memberikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

"Saya sangat menghargai upaya BRI untuk ikut mendukung transformasi ekonomi dan menciptakan pemberdayaan terutama kepada UMKM, sehingga pertumbuhan perekonomian tidak hanya tinggi namun inklusif dan berkualitas," ujar Sri Mulyani.

Ia juga mendorong BRI untuk terus meningkatkan jumlah Desa BRILiaN. "Jadi kalau tadi Desa BRILiaN masih sekitar 4.300 desa, saya harap tahun depan sudah bisa naik 3 kali lipat sehingga menjadi *at least* 1 per 3 atau 1 per 4 dari total desa di Indonesia", tambahnya.

Program Desa BRILiaN sendiri merupakan program inkubasi dari BRI yang mendukung pengembangan desa me-

lalui empat aspek utama: penguatan BUMDes, digitalisasi, inovasi, dan sustainability. Hingga akhir tahun 2024, jumlah Desa BRILiaN yang dibangun oleh BRI mencapai 4.327 desa di seluruh Indonesia, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.178 desa.

Di samping itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa BRI memainkan peranan penting dalam mendukung pembiayaan UMKM dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan keberpihakan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

"Terima kasih kepada BRI atas komitmennya memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dari sisi business model tetap *profitable* dan mampu memberikan manfaat langsung bagi UMKM di seluruh Indonesia. Ini adalah keberpihakan yang penting menuju pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, namun tetap inklusif dan *sustainable*", jelasnya.

Sebagai bank dengan fokus utama pada segmen mikro, BRI terus memperkuat ekosistem pembiayaan bagi UMKM. Hingga akhir September 2024, BRI mencatatkan total penyaluran kredit mencapai Rp 1.353,36 triliun, tumbuh 8,21% secara tahunan (yoy). Selain itu, melalui integrasi Holding Ultra Mikro, BRI bersama



Ketua MPR, Menko, Menteri dan Wakil Menteri terkait turut hadir dalam pembukaan acara BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang.

Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) telah menyalurkan pembiayaan kepada total 50 juta nasabah UMKM, di mana 36 juta di antaranya merupakan nasabah Ultra Mikro. Tak hanya memberikan akses permodalan, BRI juga aktif dalam pendampingan dan edukasi guna meningkatkan literasi keuangan serta mendorong pelaku UMKM untuk menabung. Saat ini, BRI telah melayani lebih dari 180 juta rekeningtabungan nasabah UMKM.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global

dan domestik, serta *policy responses* yang dapat diambil untuk mengatasinya. "Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan *strategic responses* dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya.

Pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dan BRI Microfinance Outlook 2025 digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis (30/1/2025). Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wa-

kil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

Mengusung tema "Broadening MSME's Global Outreach," alias Memperluas Jangkauan Global UMKM, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 digelar di ICE BSD City Tangerang pada 30 Januari s.d 2 Februari 2025. Tak ketinggalan, pada 30 Januari, BRI juga turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Menghadirkan beragam panggung

hiburan dari musisi papan atas tanah air, pada event ini ribuan UMKM lokal siap memamerkan produk terbaiknya.

Pada tahun ini jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mengalami peningkatan dan mencapai 1.000 UMKM. UMKM terpilih dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM). Untuk memeriahkan acara, BRI pun menghadirkan *special performances* dari sejumlah musisi papan atas seperti Juicy Luicy, Bernadya, Tulus, Lyodra, Maliq & D'sessentials, Sal Priadi, Ghea Indrawati, hingga Andmesh yang dapat ditonton secara gratis oleh seluruh pengunjung. (*)

DAMPAK TIGA BIBIT SIKLON

BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem

JAKARTA (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar mewaspada potensi cuaca ekstrem, dampak dari munculnya tiga bibit siklon yaitu 90S, 99S, dan 96P yang dapat berpengaruh terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia.

"Dampak dari ketiga bibit siklon ini yang perlu kita waspada di bahkan siagakan, terutama bibit siklon 90P yang memicu curah hujan yang sangat deras hingga ekstrem," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam jumpa pers virtual terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia yang dipantau melalui laman YouTube Info BMKG, di Jakarta, Sabtu (2/2) malam.

Ia menjelaskan, bibit siklon tropis 90S muncul di wilayah Selatan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, bibit siklon 99S

muncul di Selatan Banten, sedangkan bibit siklon 96P muncul di Teluk Carpentaria di Australia atau di Selatan wilayah Papua.

Kemunculan bibit siklon itu, kata Dwikorita, merupakan kondisi terbaru potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa fenomena yang berdampak pada cuaca ekstrem seperti pengaruh monsun atau angin dari Benua Asia dengan intensitas yang menguat bersamaan dengan La Nina yang lemah.

Selain itu, masih ada pengaruh

Madden Julian Oscillation (MJO) yang semakin bergerak ke arah Indonesia bagian tengah dan juga pengaruh serukan udara dingin dari Dataran Tinggi Siberia, labilitas Atmosfer secara lokal, serta masih ada pengaruh Gelombang Ekuator Rossby dan Kelvin. "Jadi ini (kemunculan bibit siklon tropis) 'mainan baru' istilahnya," katanya.

BMKG memprediksi dua siklon tropis, yakni Siklon 99S dan Siklon 90S akan mendekati ke wilayah DIY pada 5 Februari 2025. Kedua siklon tersebut saat ini berada di Selatan Samudera Hindia dan diperkirakan akan memicu terjadinya curah hujan yang sangat tinggi di DIY, periode 1-7 Februari. Adapun puncak dari cuaca ekstrem diprediksi pada 5 Februari. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Badan Penanggulangan

dan Bencana Daerah (BPBD) DIY mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat fenomena alam ini dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana seperti tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang.

"Memang beberapa daerah di DIY telah dipetakan sebagai wilayah rawan yang perlu waspada, baik di pesisir maupun di daerah perbukitan. Termasuk peningkatan ketinggian gelombang di sepanjang pantai, yang diperkirakan mencapai 3-5 meter. Menyikapi kondisi itu kewaspadaan masyarakat tetap dibutuhkan," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Minggu (2/2).

Ia mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke pantai sebaiknya waspada potensi gelombang tinggi di Kawasan Pantai. (Ria/Ant)-f

TPPU, Polri Sidik Korupsi LPEI

JAKARTA (KR) - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri memulai penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF) periode 2012-2016. Kasus tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. "Kami akan menuntaskan penyidikan ini secara profesional guna menemukan tersangka dan memulihkan kerugian negara," kata Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri Irfan Pol Cahyono Wibowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (2/2).

Dijelaskan, penyelidikan ini berawal dari temuan penyimpangan dalam proses pemberian pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPEI. Akibatnya, dana yang disalurkan digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, yang berujung pada kerugian negara yang besar.

Berdasarkan keterangan penyidik, ungkap Cahyono, LPEI memberikan pembiayaan kepada PT DST yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengarah pada kredit macet senilai Rp 45 miliar dan 4,125 juta dolar AS sejak tahun 2012 hingga 2014. Kemudian dengan skema novasi, PT MIF mengambil alih kewajiban PT DST, namun pembiayaan yang diberikan kepada PT MIF juga digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. (Ant/Has)-f

BPJS KESEHATAN MESTI LEBIH TRANSPARAN

Pending Klaim Berpotensi Maladministrasi

PANGKALPINANG (KR) - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti potensi maladministrasi pending klaim BPJS Kesehatan. Mengingat hal itu bisa menghambat penyediaan alat kesehatan, kefarmasian, logistik penunjang dan jasa layanan medis terstandarisasi kepada masyarakat. "Sengketa klaim pembiayaan antara ratusan rumah sakit di Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan ini merupakan masalah krusial pelayanan publik," kata Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di Pangkalpinang, Minggu (2/2).

Menurutnya, pending klaim pembayaran layanan kesehatan patut dilihat dari segi potensi maladministrasi yang ditimbulkan, karena rumah sakit dan BPJS Kesehatan merupakan pranata layanan publik yang amat vital dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. "Pending klaim pembayaran layanan ini tentu muaranya terjadi penundaan berlarut, bahkan tidak diberikannya layanan kesehatan oleh pihak rumah sakit kepada pa-

sien yang dapat mengancam keselamatan jiwanya," ujarnya.

Robert menyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki untuk mengatasi potensi maladministrasi pending klaim BPJS Kesehatan. Pertama, pemerintah wajib mengantisipasi sengketa klaim agar tidak menimbulkan maladministrasi layanan kepada pasien. Kedua, BPJS Kesehatan mesti lebih transparan ke pihak pemda dan membangun komunikasi dengan organisasi perhimpunan rumah sakit apabila ada potensi hambatan klaim rumah sakit.

Ketiga, rumah sakit mesti lebih akurat dan terus diawasi agar tidak melakukan fraud dalam klaim tarif INA-CBGs. Pembayaran klaim itu hak setiap fasyankes yang telah melaksanakan kewajiban pelayannya. Keempat, pemda diminta untuk lebih proaktif dalam merespon pending claim ini. Pemerintah tidak semata hanya berperan sebagai mediator saat sengketa sudah terjadi. (Ant/Has)-f

RUU BUMN Siap Diparipurnakan Pekan Depan

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua DPR RI Sufni Dasco Ahmad mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II guna disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (4/2) pekan depan.

Hal itu disampaikan usai menghadiri persetujuan tingkat I RUU BUMN dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Sekretaris Negara RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Sabtu (1/2).

Ia juga menyebut tidak ada hal khusus bagi pihaknya dalam menggelar rapat kerja persetujuan tingkat I terhadap RUU BUMN pada akhir pekan ini. Sebab, pembahasan RUU terkait sebelumnya telah bergulir in-

tens sebelumnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU BUMN dibawa ke rapat paripurna guna diambil persetujuan pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang. "Setelah menerima, mendengarkan dan melihat pendapat akhir fraksi-fraksi dapat kami simpulkan, dari delapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui RUU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna untuk disetujui sebagai undang-undang," ujar kata Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini dalam Rapat Kerja Tingkat I, di Kompleks Parlemen, Sabtu (1/2).

Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa poin yang akan dibahas dalam RUU BUMN tersebut, di antaranya penyesuaian definisi BUMN yang nantinya mempertegas tugas BUMN sesuai perkembangan

regulasi.

Sementara itu, pemerintah mendukung revisi UU tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mewakili Presiden, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen.

"Setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi. Izinkanlah kami mewakili Bapak Presiden RI dalam rapat tingkat satu ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemerintah menyatakan mendukung RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Tingkat II Paripurna DPR RI," kata Supratman. (Ant)-f